



Teori dan Model Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Gizka Amalia Putri¹, Masduki Duryat², Izin Faizin³, Asep Reiki Paibi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: gizkaamaliaputri2710@gmail.com, masduki@uinss.ac.id, izinfaizinpasca@gmail.com,
asepreiki981@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-03	Education is a strategic sector in national development that is heavily influenced by public policy. Various problems such as disparities in access to education, disparities in teacher quality, curriculum changes, and the challenges of digitalization demonstrate the importance of educational policies based on appropriate theories and models. This study aims to examine the concepts, theories, and models of public policy in education and their role in improving the quality of education. The method used is a qualitative research approach with a literature study approach, utilizing secondary data from books, scientific journals, academic articles, and relevant official documents. Data analysis techniques are carried out through content analysis with the stages of data reduction, data presentation, and descriptive conclusion drawing. The results of the study indicate that public policy in education is a series of government actions systematically designed to regulate and develop the education system. This policy plays a role in equalizing access to education, improving teacher competence and welfare, providing infrastructure, curriculum development, quality control, and digitalization of education. In addition, the formulation of educational policy is influenced by various theories and models such as rational, incremental, mixed scanning, coalition advocacy, process, elite, institutional, and system. Each model has advantages and limitations, so flexibility in its application is needed to make education policy more effective, adaptive, and contextual.
Keywords: <i>Policy Theory;</i> <i>Policy Model;</i> <i>Public Policy;</i> <i>Education.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-03	Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan bangsa yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik. Berbagai permasalahan seperti kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan kualitas guru, perubahan kurikulum, dan tantangan digitalisasi menunjukkan pentingnya kebijakan pendidikan yang berbasis teori dan model yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, dan model kebijakan publik dalam pendidikan serta perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menggunakan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam pendidikan merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan. Kebijakan ini berperan dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pengawasan mutu, serta digitalisasi pendidikan. Selain itu, perumusan kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai teori dan model seperti rasional, inkremental, mixed scanning, advokasi koalisi, proses, elit, kelembagaan, dan sistem. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam penerapannya agar kebijakan pendidikan lebih efektif, adaptif, dan kontekstual.
Kata kunci: <i>Teori Kebijakan;</i> <i>Model Kebijakan;</i> <i>Kebijakan Publik;</i> <i>Pendidikan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh

kebijakan publik yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan publik dalam pendidikan menjadi instrumen utama dalam mengatur arah, tujuan, serta strategi penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah (Dwi et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, berbagai persoalan pendidikan masih sering muncul, seperti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), ketimpangan kualitas guru, perubahan kurikulum yang dinilai belum sepenuhnya stabil, serta tantangan digitalisasi pendidikan (Aderempas et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, tetapi juga landasan teori dan model kebijakan yang tepat agar dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Secara akademik, kebijakan publik dalam pendidikan tidak lahir secara spontan, melainkan didasarkan pada teori dan model tertentu. Terdapat berbagai teori dan model-model kebijakan publik dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Pemahaman terhadap teori dan model tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat reaktif, melainkan sistematis, terukur, dan kontekstual.

Lebih lanjut, kebijakan publik memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Firiansyah et al., 2024). Kebijakan dapat menentukan standar nasional pendidikan, sistem evaluasi, distribusi anggaran pendidikan, pengembangan kompetensi guru, hingga pemerataan akses pendidikan. Dengan kebijakan yang tepat, mutu pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan ketidakefisienan, ketimpangan, bahkan penurunan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai teori dan model kebijakan publik dalam pendidikan menjadi penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang pengertian kebijakan publik dalam pendidikan, teori dan model-model kebijakan publik dalam pendidikan, serta peran kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan model kebijakan publik dalam pendidikan yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian (Haifa et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, serta kesesuaian dengan fokus kajian (Bancong, 2025).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta model kebijakan publik dalam pendidikan yang ditemukan dalam literatur. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan instrument strategis negara dalam mengarahkan pembangunan dan menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat (Nazila et al., 2025). Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah semata, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang dirancang secara sadar, sistematis, dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui kebijakan publik, negara menjalankan fungsi pengaturan, pengarahan, sekaligus pengembangan dalam berbagai sektor kehidupan.

Secara lebih spesifik, kebijakan publik mengatur dan mengarahkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya, sehingga tercipta keteraturan sosial yang memungkinkan masyarakat mencapai kebaikan bersama secara efektif (Hafidati, 2023). Dengan kata lain, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman kolektif yang mengikat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

Beberapa ahli turut memperkuat pemahaman tersebut, Harold D Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktik tertentu. Carl J Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rantung, 2024). Sementara itu, Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan yang

memiliki tujuan tertentu dan dirancang oleh aktor pemerintah untuk mengatasi masalah publik (Permana et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan publik mengandung unsur tujuan yang jelas, tindakan yang terencana, serta orientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Hafidati (2023) terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Apabila dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, proses perumusan kebijakan pendidikan harus melalui tahapan yang sistematis sebelum membuat kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan implementatif.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik menempati posisi yang sangat strategis karena pendidikan merupakan fondasi utama Pembangunan sumber daya manusia (Chairuddin, 2023). Pendidikan berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan menjadi instrument penting dalam menentukan kualitas dan arah masa depan suatu bangsa.

Kebijakan pendidikan menentukan arah, tujuan, isi, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan nasional (Muharnis & Fadriati, 2023). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengatur berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum, sistem pembiayaan pendidikan, pemerataan akses, peningkatan

kompetensi dan profesionalisme guru, penyediaan sarana dan prasarana, hingga sistem evaluasi dan akreditasi. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

Dengan demikian, kebijakan publik dalam pendidikan dapat dipahami sebagai seperangkat keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan sistem pendidikan nasional guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

B. Peran Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pondasi pengetahuan dan karakter anak-anak. Untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Berikut merupakan beberapa peran kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Pusdastra, 2024):

1. Penyediaan akses pendidikan yang merata
Kebijakan publik berperan dalam memastikan setiap anak di seluruh Indonesia memiliki akses yang merata terhadap pendidikan dasar. Program seperti Wajib Belajar 9 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang untuk meningkatkan partisipasi siswa, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. BOS, misalnya, memberikan bantuan dana langsung kepada sekolah-sekolah negeri dan swasta untuk meringankan biaya pendidikan, sehingga mengurangi beban finansial orang tua dan memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

2. Peningkatan kompetensi guru
Kualitas pendidikan sangat tergantung pada kompetensi guru. Pemerintah melalui kebijakan publik mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional guru. Program Sertifikasi Guru adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mengajar dan kesejahteraan guru. Pelatihan rutin, sertifikasi, dan peningkatan jalur karier adalah bagian dari kebijakan ini, yang bertujuan untuk memotivasi guru dan meningkatkan kemampuan mengajar mereka, sehingga dapat menciptakan

lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.

3. Penyediaan sarana dan prasarana

Kebijakan publik mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan infrastruktur pendidikan. Ini mencakup penyediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi dan air bersih. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa.

4. Pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan

Kebijakan publik juga mengatur pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Sebagai contoh, kurikulum 2013 dirancang untuk menekankan pembelajaran berbasis kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini juga dirancang untuk lebih inklusif, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif.

5. Pengawasan dan evaluasi pendidikan

Pemerintah melalui kebijakan publik melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pendidikan dasar untuk memastikan implementasi yang efektif. Lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) bertugas untuk menilai kualitas sekolah dan madrasah, serta memberikan akreditasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian berbasis data juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah, yang kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif.

6. Digitalisasi pendidikan

Dalam era teknologi digital, pemerintah mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan dasar. Program seperti "Merdeka Belajar" dan "Guru Penggerak" bertujuan untuk mengadopsi teknologi dalam pembelajaran, baik melalui

pengadaan perangkat teknologi, pelatihan bagi guru, maupun pengembangan konten pembelajaran digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses informasi tetapi juga membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital.

7. Peningkatan kesejahteraan guru

Kebijakan publik juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Tunjangan profesi, insentif bagi guru di daerah terpencil, dan program jaminan sosial adalah beberapa langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan para guru dapat lebih termotivasi dalam mengajar dan memberikan kontribusi maksimal dalam mencerdaskan bangsa.

8. Kemitraan dengan sektor swasta dan LSM

Kebijakan publik juga membuka ruang untuk kemitraan dengan sektor swasta dan LSM dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Kolaborasi ini melibatkan program-program pelatihan, pengembangan kurikulum, dan penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu. Kemitraan ini membantu memperluas cakupan dan dampak dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

C. Teori-Teori Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Teori kebijakan publik merupakan kerangka pemikiran yang membantu menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dibuat, dibahas, dilaksanakan, hingga dievaluasi. Teori-teori ini membantu memahami pengaruh faktor politik, ekonomi dan sosial dalam proses kebijakan. Seperti model rasional, incremental, mixed scanning, dan advokasi koalisi. Dengan memahami teori-teori tersebut, proses kebijakan pendidikan yang kompleks dapat dipahami dengan lebih sederhana dan menyeluruh.

Dalam praktik perumusan kebijakan publik jarang terlihat suatu kebijakan yang hanya terdiri dari keputusan Tunggal, untuk itu ada beberapa teori yang digunakan dalam perumusan kebijakan yang ada dalam kebijakan publik, antara lain (Septiana et al., 2023):

1. Teori rasional komprehensif

Teori pengambilan keputusan ini paling dikenal oleh berbagai kalangan dengan memiliki beberapa unsur:

- a) Pengambilan keputusan terhadap suatu masalah harus dapat dibedakan antara masalah yang satu dengan masalah lain sehingga dapat dinilai dan diselesaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- b) Setiap tujuan, nilai, dan sasaran yang berpedoman dalam pengambilan kebijakan harus jelas dan ditetapkan sebagai urutan tertinggi sesuai dengan kepentingan pembuatan keputusan.
- c) Menemukan berbagai alternatif sehingga dapat diteliti secara baik untuk dapat mengatasi setiap permasalahan.
- d) Memperhitungkan sebab akibat yang timbul karena pilihan alternatif yang diambil.
- e) Pembuatan kebijakan selalu memilih alternatif dengan akibat yang maksimal dalam mencapai suatu tujuan.

2. Teori inkremental

Teori ini mencerminkan perumusan kebijakan yang menghindari banyaknya pertimbangan dan lebih memperhatikan cara-cara yang harus dipakai oleh para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. pokok-pokok dari teori ini adalah:

- a) Pilihan terhadap tujuan dan analisis tindakan yang nyata dalam pencapaian tujuan yang saling memiliki keterikatan.
- b) Perumusan kebijakan sering lebih mempertimbangkan alternatif yang lebih memiliki hubungan dengan pokok permasalahan.
- c) Setiap masalah yang timbul dari pengambilan keputusan akan diartikan dengan teratur, sehingga dapat diantisipasi dampak dari masalah-masalah yang timbul dan ditanggulangi.

3. Teori pengamatan terpadu

Teori pengamatan terpadu merupakan perumusan kebijakan pemerintah yang memanfaatkan kedua teori sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi yang berbeda. model ini lebih dipertimbangkan tentang tingkat kemampuan pengambil keputusan secara umum hingga dapat

melaksanakan implementasi terhadap keputusan yang telah diambil.

D. Model-Model Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Model kebijakan publik adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks pendidikan, model kebijakan membantu memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, siapa yang terlibat, serta bagaimana dampaknya terhadap sistem pendidikan (Fathoni et al., 2025). Model ini penting karena kebijakan pendidikan tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses politik, administratif, dan sosial yang kompleks.

1. Model Rasional

Model rasional berangkat dari asumsi bahwa kebijakan dapat dibuat secara sistematis melalui identifikasi masalah, pengumpulan data, penentuan tujuan, eksplorasi alternatif, dan pemilihan opsi terbaik. Model ini menekankan logikan dan efisiensi. Hasil penelitian Nazila et al., (2025) menunjukkan bahwa model rasional masih menjadi rujukan utama dalam kajian akademik kebijakan di Indonesia, meskipun penerapannya dalam praktik terbatas.

Dalam pendidikan, penerapan model rasional tampak pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek, perencanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Keunggulannya adalah memberikan dasar yang kuat untuk keputusan berbasis bukti. Namun, model ini menuntut analisis mendalam berbasis data yang komprehensif dan pertimbangan objektif terhadap berbagai alternatif. Namun, keterbatasan sumber daya, waktu, serta kuatnya kepentingan politik membuat model ini sulit diterapkan secara utuh. Akibatnya, pendekatan rasional umumnya hanya digunakan secara parsial, terutama pada tahap awal perumusan (Nazila et al., 2025).

2. Model Inkremental

Model inkremental menyatakan bahwa kebijakan publik seringkali lahir dari penyesuaian kecil terhadap kebijakan

sebelumnya, bukan dari perubahan total (Kamila & Hadi, 2025). Model ini dianggap lebih realistis karena sesuai dengan kondisi birokrasi dan politik yang kompleks (Nazila et al., 2025). Dalam pendidikan Indonesia, contoh penerapan model ini adalah perubahan bertahap dari Ujian Nasional ke Assesmen Nasional. Alih-alih menghapus total sistem evaluasi, pemerintah memilih memperbaiki indikator dan metode pengukuran mutu. Model inkremental ini memudahkan penerimaan publik, tetapi dikritik kurang progresif dalam menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan mutu antar daerah.

3. Model *Mixed Scanning*

Model *Mixed Scanning* sebagai sintesis antara rasional dan inkremental. Model ini menggunakan analisis mendalam untuk keputusan strategis, sambil tetap fleksibel dengan penyesuaian bertahap dalam implementasi. Model ini relevan untuk kebijakan digitalisasi sekolah atau program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah menetapkan visi jangka Panjang, seperti transformasi digital dalam pembelajaran, namun dalam implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya guru. Model *mixed scanning* dinilai efektif karena mampu menjaga arah strategis sekaligus realistis dalam penerapannya.

4. Model Advokasi Koalisi

Advocacy Coalition Framework (ACF) menekankan bahwa kebijakan adalah hasil interaksi kelompok kepentingan yang berbagi ideologi, nilai, dan keyakinan. Kebijakan lahir dari kompetensi maupun kolaborasi koalisi advokasi yang memengaruhi agenda pemerintah.

Dalam pendidikan, hal ini terlihat pada perdebatan kurikulum merdeka, pendidikan karakter, dan moderasi beragama. Aktor yang terlihat tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, LSM, organisasi profesi guru, hingga tokoh agama. Teori ini menegaskan bahwa dimensi politik dan nilai sama pentingnya dengan dimensi teknokratis dalam proses kebijakan pendidikan.

5. Model Proses

Model proses merupakan model perumusan kebijakan yang sistematis dan bertahap. Menurut Dye (2011) model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu proses politik yang terdiri atas beberapa langkah berurutan, yaitu: 1) identifikasi masalah, 2) penetapan agenda, 3) perumusan proposal kebijakan, 4) legitimasi atau pengesahan kebijakan, 5) implementasi, dan 6) evaluasi (Suprayitno et al., 2024).

Kelebihan model proses terletak pada pendekatannya yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga setiap tahapan dirancang secara cermat sebelum kebijakan ditetapkan. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus melalui rangkaian prosedur yang cukup panjang (Fathoni et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan, model proses sangat relevan karena kebijakan pendidikan seperti perubahan kurikulum, sistem penerimaan peserta didik, atau program peningkatan mutu sekolah memerlukan tahapan yang jelas dan terencana. Melalui identifikasi masalah pendidikan yang tepat, perumusan kebijakan yang matang, serta evaluasi berkelanjutan, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun masyarakat.

6. Model Teori Elit

Model teori elit menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, dirumuskan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan, sementara masyarakat hanya menjadi pelaksana. Model ini membagi masyarakat ke dalam tiga lapisan: elit (jumlah kecil dan berkuasa), pejabat atau administrator sebagai perantara, dan massa (jumlah besar) sebagai pihak yang diatur (Kholifah et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan, kebijakan seperti kurikulum, zonasi, atau sistem seleksi peserta didik sering kali lebih mencerminkan kepentingan dan kesepakatan elit politik daripada aspirasi masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif agar benar-

benar menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat luas.

7. Model Kelembagaan

Model kelembagaan menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik merupakan tanggung jawab pemerintah. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah dianggap sah karena memiliki legitimasi negara, bersifat universal, dan hanya pemerintah yang berhak memaksakan pelaksanaannya secara legal (Dewi, 2022).

Dalam konteks pendidikan, model ini menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan seperti kurikulum, standar nasional, dan sistem evaluasi. Namun, karena bersifat tradisional dan minim partisipasi masyarakat atau stakeholder, kebijakan yang dihasilkan berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, model ini perlu dipadukan dengan pendekatan yang lebih partisipatif agar kebijakan pendidikan menjadi lebih efektif dan inklusif.

8. Model Sistem

Model sistem menekankan bahwa kebijakan dirumuskan melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder dengan mempertimbangkan kondisi nyata. Berdasarkan pendekatan David Easton, proses ini melibatkan **input** (aspirasi, tuntutan, dukungan masyarakat) yang diolah menjadi **output** (kebijakan), lalu dievaluasi kembali melalui umpan balik. Sistem akan berjalan baik jika mampu menghasilkan kebijakan yang memuaskan, memperkuat dukungan internal, dan menggunakan otoritas secara tepat (Fathoni et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan, contohnya adalah penerapan **kurikulum Merdeka**. Kebijakan ini lahir dari masukan guru, sekolah, dan kebutuhan perubahan pembelajaran pascapandemi (**input**), kemudian ditetapkan pemerintah sebagai kebijakan nasional (**output**). Pelaksanaannya terus dievaluasi melalui pelatihan guru dan survei umpan balik, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Relevansi model kebijakan terlihat dari beragamnya persoalan yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam pendidikan

yang memiliki kondisi sosial dan geografis berbeda-beda. Karena itu, tidak ada satu model yang paling unggul untuk diterapkan di semua situasi. Fleksibilitas dalam memilih atau memadukan model menjadi kunci agar kebijakan lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Pemahaman berbagai model memberi dasar teoretis bagi pembuatan kebijakan. Namun, keberhasilannya juga ditentukan oleh kapasitas birokrasi, kondisi politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder pendidikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan publik dalam pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan sistem pendidikan nasional demi mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kebijakan ini bersifat terarah, memiliki tujuan yang jelas, didasarkan pada peraturan yang mengikat, serta diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar rencana.

Dalam praktiknya, kebijakan publik berperan penting dalam pemerataan akses pendidikan (seperti program Wajib Belajar dan BOS), peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pengawasan mutu, hingga digitalisasi pendidikan. Semua peran tersebut bertujuan untuk menjamin pendidikan yang bermutu, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara teoretis, perumusan kebijakan pendidikan dapat dipahami melalui berbagai teori dan model seperti rasional, inkremental, *mixed scanning*, advokasi koalisi, proses elit, kelembagaan, dan sistem. Masing-masing model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga tidak ada satu model yang paling tepat untuk semua situasi. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan memadukan berbagai pendekatan menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan dalam menjawab tantangan yang kompleks dan dinamis.

B. Saran

Untuk mendorong kemajuan kajian kebijakan publik dalam pendidikan, disarankan agar penelitian lebih berbasis data (*evidence-based*) dan kontekstual sesuai kondisi Indonesia. Selain itu, perlu penguatan

kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara nyata. Pengembangan kajian interdisipliner serta pemanfaatan teknologi digital juga penting untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Terakhir, evaluasi kebijakan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar kebijakan pendidikan lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Aderempas, T., Lukman, A., & Emmi, K. H. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Bancong, H. (2025). *Strategi Reviu Riset Dan Konstruksi Teori: Metode, Analisis, Dan Studi Kasus*. Indonesia Emas Group.
- Chairuddin, M. (2023). Konsep Kebijakan Dan Perencanaan Strategis Dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 21(2), 204–215.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota Ikapi).
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100.
- Fathoni, W., Nasution, I. W., Yusup, M., & Asiah, N. (2025). Teori Dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Firiansyah, I., Khoiri, M., & Haldy, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Batam Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Dialektika Publik Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 8(2), 27–39.
- Hafidati, P. (2023). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 5(1), 63–78.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Kamila, I. F., & Hadi, S. (2025). *Teori-Teori Kebijakan Publik Dalam Bidang Pendidikan : Analisis Konseptual Atas Relevansi Model Rasional , Inkremental , Mixed Scanning , Dan Advokasi-Koalisi*. 9(12), 377–381.
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404.
- Muharnis, M., & Fadriati, F. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 49–59.
- Nazila, K., Sari, A. R., Mulyana, S., Ridhoansyah, N., & Nasor, M. (2025). Pendekatan Proses Dan Model-Model Kebijakan. *Unisan Jurnal*, 4(8), 143–154.
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457.
- Pusdastra. (2024). *Peran Kebijakan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar*. Pusat Pengembangan Sumber Daya Dan Prestasi.
<https://pusdastra.uma.ac.id/2024/08/03/Peran-Kebijakan-Publik-Dalam-Peningkatan-Kualitas-Pendidikan-Dasar-3/>
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model). *Penerbit Tahta Media*.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., & Wandan, H. (2023). *Kebijakan Publik: Teori , Formulasi* (A. Yanto (Ed.)). Pt Global Eksekutif Teknologi.
<https://www.researchgate.net/profile/Anis-Ribcalia-Septiana-Suprpto/links/64569dd25762c95ac378d294/Anis-Ribcalia-Septiana-Suprpto.pdf>

Suprayitno, D., Selvia, F., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.